

NAMA : Maya Lisnawati
NPM : 2413031043
KELAS : 2024 B
MATA KULIAH : Teori Akuntansi

CASE STUDY PT GARUDA SEJAHTERA

1. Kritik keputusan Garuda menggunakan nilai wajar

Keputusan PT Garuda Sejahtera menggunakan nilai wajar dapat dibenarkan secara konseptual karena IFRS maupun PSAK mengakui fair value sebagai dasar pengukuran yang mampu memberikan informasi relevan bagi investor, terutama dalam menarik investor global. Namun, penerapannya di Indonesia memiliki kendala serius, yaitu keterbatasan pasar aktif untuk pesawat. Kondisi ini membuat pengukuran nilai wajar rentan mengandalkan asumsi subjektif, sehingga menurunkan keandalan informasi. Auditor berhak mengingatkan hal ini karena laporan keuangan tidak hanya harus relevan, tetapi juga harus dapat diverifikasi dan mencerminkan kondisi ekonomi riil. Dengan demikian, fair value hanya tepat digunakan bila perusahaan melengkapinya dengan metodologi penilaian yang transparan, pengungkapan rinci, dan dukungan dari penilai independen.

2. Perbandingan tujuan laporan keuangan PSAK dan IFRS

Tujuan laporan keuangan menurut IFRS adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK yang telah mengadopsi IFRS juga memiliki tujuan serupa, yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna eksternal. Bedanya, PSAK tetap disusun dengan mempertimbangkan konteks regulasi dan praktik di Indonesia,

sehingga walaupun selaras secara konseptual, penerapannya lebih menyesuaikan dengan kondisi domestik.

3. Perbandingan karakteristik kualitatif informasi

IFRS menekankan relevansi dan faithful representation sebagai karakteristik utama, yang diperkuat oleh karakteristik peningkat seperti keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman. PSAK pada dasarnya mengadopsi kerangka yang sama, namun dalam praktiknya lebih menekankan keseimbangan antara relevansi dan keandalan. Hal ini mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk tetap berhati-hati dalam menerapkan standar global, khususnya dalam pasar yang belum sepenuhnya likuid.

4. Perbandingan basis pengukuran

IFRS mengakui berbagai basis pengukuran, termasuk historical cost, current cost, realizable value, present value, dan fair value. Penggunaan fair value diatur secara ketat dalam IFRS 13, dengan syarat adanya pasar aktif atau teknik valuasi yang dapat diverifikasi. PSAK yang sudah mengadopsi IFRS juga mengizinkan penggunaan nilai wajar, misalnya dalam PSAK 16 yang memperbolehkan revaluasi aset tetap. Namun, PSAK menekankan bahwa nilai wajar harus dapat diukur secara andal, dan dalam kondisi pasar Indonesia yang terbatas, penekanan ini menjadi sangat penting.

5. Perbandingan asumsi entitas dan kelangsungan usaha

IFRS menggunakan asumsi dasar bahwa entitas akan melanjutkan usahanya (going concern) kecuali ada bukti yang kuat sebaliknya, dengan kewajiban pengungkapan jika terdapat ketidakpastian material. PSAK juga mengadopsi prinsip yang sama, tetapi praktik pengawasannya lebih disesuaikan dengan regulasi domestik. Dengan demikian, meskipun sama secara konseptual, pengungkapan dalam PSAK sering kali diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan regulator di Indonesia.

6. Apakah PSAK sudah memadai untuk menjawab dinamika global?

Secara konseptual, PSAK sudah memadai karena merupakan hasil konvergensi dengan IFRS sehingga mampu menjawab kebutuhan pelaporan global. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan, seperti pasar yang belum likuid, keterbatasan kapasitas penilai independen, dan pemahaman investor domestik yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK sudah cukup kuat, penerapan nilai wajar dalam konteks Indonesia memerlukan kehati-hatian lebih dibandingkan negara dengan pasar yang lebih matang.

7. Apakah Indonesia perlu mengikuti IFRS sepenuhnya tanpa penyesuaian lokal?

Mengikuti IFRS sepenuhnya tanpa penyesuaian lokal tidak ideal. IFRS memang memberikan standar global yang meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, tetapi Indonesia memiliki faktor khusus seperti kematangan pasar yang belum setara dengan negara maju, keterbatasan data valuasi, serta kebutuhan sosial-ekonomi domestik. Oleh karena itu, konvergensi substantif tetap penting agar Indonesia sejajar dengan standar internasional, tetapi harus diiringi dengan penyesuaian lokal yang bersifat teknis agar penerapannya lebih realistis dan dapat menjaga stabilitas serta kepercayaan publik